

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdulkadir, M. (1982). *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Agus, S. (2022). *Kajian Hukum Sosial dan Budaya Hukum di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *Sistem Hukum Indonesia: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Pustaka Prometheus.
- Asikin, A. D. Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Revisi)*. Rajawali Pers. PT RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P., & Made, I. (2017). *Metode penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Faisal, R. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum dalam Perspektif Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayah, Dewi N. (2020). *Reformasi peradilan di Indonesia*. Surabaya: Rajawali Press.
- Ibrahim. (2017). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indrati, M. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahfud MD, M. (2015). *Hukum dan Dinamika Sosial (Edisi Revisi)*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meliala, A. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. P. D. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Miru, A., Sakka, P. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2021). *Hukum dan Masyarakat: Perspektif Sistem Hukum*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Purwoto, A. dkk. (2023). *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Putra, I Nyoman Darma. (2018). *Sistem Hukum dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Sutjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- Rahardjo, Sutjipto. (2006). *Ilmu Hukum, Cetakan ke-6*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Roihan A, R. (1998). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press
- Salim, HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, Arief. (2019). *Manajemen Peradilan dan Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soeharso, E. (2020). *Reformasi Hukum dan Teori Sistem Hukum (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subekti. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa.
- Suratman dan H. Phillips Dillah. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakariah, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al mawaddah Warrahmah Kolaka.

Artikel Dalam Jurnal

- Akbar, M. K. (2020). Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Dharmasiswa*, 1(1), 352–363.
- Ali, Achmad., Heryani, W. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kharisma Putra Utama.
- Armia, M. (2022). Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum. In C. Fahmi (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Borman, M. S. (2017). Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).
- Busthami, D. (2018). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336.

- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 119.
- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020). Metode Penelitian Hukum. In *Mataram University Press* (1st ed., Vol. 11, Issue 1). Mataram University Press.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. *Tahkim*, 10, 160–168.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Lestari, D. (2020). Digitalisasi Layanan Peradilan oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Reformasi Peradilan*, 8(3), 20-29
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828.
- Noor, M. (2020). Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(1), 53.
- Nugraha, I. M. D. S., Dkk. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Peningkaran Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Pada World Travel Marketing Co., Ltd. Korea Kepada Pt. Campuhan Agung). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 57–68.
- Panjaitan, B. (2015). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Perdailan Tata Usaha Negara (PTUN). *Jurnal Ilmiah "Advokasi,"* 03(02), 1–17.
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Perspektif Hukum*, 1(1), 45–58.
- Praptono, E., Idayanti, S., & Hadha, K. (2019). DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015. *Halmahera Km*, 7(2), 358745.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 471–488.
- Riskawati, S. (2018). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Instrumen Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Veritas et Justitia*, 4(1), 131–154.
- Sasmito, J. (2015). Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer. *Perspektif*, 20(1), 10.
- Sinaga, N.A., Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 15.

- Solissa, F. R., Salmon, H., & Lakburlawal, M. A. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Study Review*, 2, 1-10
- Susilo, H. (2020). *Sejarah dan Peran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi dan Hukum*. 6(2), 14-25.
- Sutahar, S. (2024). Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kudus. *Syntax Idea*, 6(1), 300–318.
- Suyatno. (2019). Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M.Friedman dalam Hukum Indonesia. *Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2(1), Hal. 199-200.
- Syarifuddin, H. M. (2020). *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Konsep Norma dan Penerapannya*.
- Tan, D. (2021). Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1332–1336.
- Tobing. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, P. (2021). Peradilan Small Claim Court 235-248 *Jurnal Ilmu Hukum. The Juris*, 2, 235–248.
- Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Hukum*, 1(5), 1–11.
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansyah. (2022). *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti*. Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP.
- Windari, R. (2014). Keberpihakan Regulasi Pertanahan Terhadap Hak Masyarakat Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat Di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 328–340.

Skripsi

- Jendra, W. (2020). *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Terhadap Penyelesaian Perdata Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Putri, D. S. A. (2019). *Penerapan Sistem Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Pengadilan Agama Cibinong*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yusnimar, E. (2022). *Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*. Universitas Lancang Kuning.

Artikel Dalam Internet

- DQLab. (31 Maret 2022). Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif, Wajib dikuasai Pemula. diakses dari <https://dqlab.id/teknik-analisis-datadeskriptif-kualitatif-wajib-dikuasai-pemula> tanggal 18 Oktober 2024.
- Hukumonline.com. (30 Mei 2024). Perbedaan Gugatan dan Permohonan. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-gugatan-danpermohonan-lt57cd94fe8f016/> tanggal 13 Oktober 2024.
- LP2M Universitas Medan Area. (12 September 2022). Analisis Deskriptif-Definisi Dan Tips Untuk Peneliti. diakses dari [Analisis Deskriptif-Definisi dan Tips Untuk Peneliti](#) tanggal 18 Oktober 2024.
- SIPP PN Singaraja. Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Singaraja. Diakses dari <https://sipp.pn-singaraja.go.id/> tanggal 7 Oktober 2024.
- Website Resmi Pengadilan Negeri Singaraja. (2023). Diakses dari <https://www.pn-singaraja.go.id/> tanggal 7 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 942.